



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK**

2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK**

Jalan Alianyang No.7B

www.dlh.pontianakkota.go.id

(0561) – 76980

dlh@pontianakkota.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini mencakup pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dan Rencana Pembayarannya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak disusun dalam upaya menentukan skala prioritas penanganan permasalahan persampahan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki berdasarkan prinsip-prinsip Good Environment dengan indikator yang dapat diukur dalam upaya mewujudkan visi kota dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Kota Pontianak 2020-2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu saran/masukan yang sangat kami harapkan dalam upaya penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang akan datang.

Pontianak, Agustus 2023

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan	I-5
1.4	Sistematika Penulisan	I-5
Bab II	Hasil Evaluasi Renja DLH Kota Pontianak Tahun Lalu	II-1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Kota Pontianak Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLH Kota Pontianak	II-1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-13
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-8
2.4	Renew Terhadap Rancangan Awal SKPD	II-20
2.5	Penelahaan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat	II-33
Bab III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-1
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-2
3.3	Program dan Kegiatan	III-4
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	IV-1
Bab V	Penutup	V-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1(satu) tahun. Penyusunan rancangan Perubahan Renja merupakan hasil pembekasan atau usulan program dan kegiatan yang telah diintegrasikan dengan hasil Musrenbang Kota Pontianak dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perubahan Renja memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Proses penyusunan Perubahan Renja dimulai dengan persiapan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Mengenalilah gambaran perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib-pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Perubahan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, dan total kebutuhan dana.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan Renstra OPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra OPD, RPJMD, RKA OPD, NUA dan PPAS, serta RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1317).
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nominaklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1731).
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2003-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 127).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen kerja PD dengan rencana PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2021), perkiraan capaian tahun berjalan (2022) dan pencapaian Rancangan Renstra Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DLH Kota Pontianak, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD tahun berjalan yang baru disahkan. Dari capaian kinerja sasaran untuk tahun 2021, masih ada indikator-indikator yang realisasinya masih belum mencapai target yang ditetapkan, diantaranya pada indikator :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Rp.15.022.554.197 terealisasi Rp.14.236.397.943 capaian kinerja sebesar 94%. Hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi yaitu :

- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak terealisasi karena Insentif retribusi penyedotan Kakus Tw 1- Tw 4 akan direalisasikan di bulan Januari 2022.
- Belanja Modal Perlatan Studio Video dan Film, tidak terealisasi karena Dunggalkan untuk membeli baterai drone, spesifikasinya tidak ditemukan di SIPD.
- Belanja Tagihan Air, tidak terealisasi sepenuhnya karena Efisiensi anggaran.
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, tidak terealisasi karena Sehubungan dengan tidak adanya penaubahan FPSU sehingga honor Tim Seleksi dari OPD lain tidak dapat direalisasikan.
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya, tidak terealisasi sepenuhnya karena Untuk service speed boat dilakukan service ringan tidak dilakukan service berat.
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya, tidak terealisasi karena Peruntukan untuk membayar pajak dan balik nama, namun administrasi penyerahan dari Palindo belum lengkap.
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, tidak terealisasi karena Ada edaran dari provinsi, khusus untuk kendaraan pengangkutan sampah tidak dibebankan pajak.
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga, tidak terealisasi karena Peruntukan untuk membayar pajak dan balik nama, namun administrasi penyerahan dari Kementerian LHK belum lengkap.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Pagu Rp.669.837.823,52 terealisasi Rp.609.294.020 capaian kinerja sebesar 91,10%. Hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi yaitu :

- ✦ Belanja Makanan dan Minuman Rapat, tidak terealisasi sepenuhnya karena tidak terdapat pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan (Pemantauan dan Pengecekan dilapangan tetap dilakukan)
- ✦ Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, tidak terealisasi sepenuhnya karena Sesuai permintaan penyedotan.
- ✦ Belanja Alat-Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor, tidak terealisasi karena Pembelian selang tidak dibelanjakan karena saat dicari untuk pengajuan SIPD nya tidak ada tidak sesuai spesifikasinya dengan kebutuhan sehingga tidak direalisasikan.
- ✦ Belanja Lembur, tidak terealisasi sepenuhnya karena Sesuai permintaan penyedotan karena masih kondisi pandemi Covid-19.
- ✦ Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya, tidak terealisasi sepenuhnya karena Hanya melakukan service ringan, service berat tidak dilakukan karena tidak terakomodir di SIPD, kerusakan tidak bisa diprediksi, antara kerusakan dan nomenklatur di dalam sistem SIPD tidak sesuai.
- ✦ Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, tidak terealisasi sepenuhnya karena tidak terdapat pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan (Pemantauan dan Pengecekan dilapangan tetap dilakukan).

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Pagu Rp.1.499.000.000 terealisasi Rp.- capaian kinerja sebesar 00,00%. Hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi yaitu :

- ✦ Karena ada beberapa harga barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, harga barang lebih mahal dari harga yang ditentukan pusat sedangkan semua barang harus lengkap, waktu yang terbatas, tender yang tidak dapat dilaksanakan.

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Pagu Rp.32.349.600 terealisasi Rp.14.094.600 capaian kinerja sebesar 59,98%. Hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi yaitu :

- ✦ Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, tidak terealisasi sepenuhnya karena Tidak terealisasi dikarenakan PPKM dan pandemi Covid-19.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Pagu Rp. 2.458.610.550 terealisasi Rp.2.319.910.964 capaian kinerja sebesar 94,363%. Hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi yaitu:

- ✦ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, tidak terealisasi sepenuhnya karena Melakukan efisiensi anggaran.
- ✦ Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, tidak terealisasi karena Kegiatan pengukohan serta pelaksanaan Krida-Krida Saka Kalpataru dilaksanakan di aula Sekolah, lokasi Bank Sampah serta Arboretum Universitas Tanjung Pura yang tidak menarik retribusi untuk sewa Gedung ataupun ruangan sehingga belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan tidak direalisasikan.
- ✦ Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, tidak terealisasi sepenuhnya Tidak terealisasi dikarenakan PPKM dan pandemi Covid-19.
- ✦ Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, tidak terealisasi dikarenakan PPKM dan pandemi Covid-19.

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Pagu Rp.47.512.100 terealisasi Rp.28.032.100 capaian kinerja sebesar 59,25%. Hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi yaitu:

- ✦ Belanja Makanan dan Minuman Rapat, tidak terealisasi sepenuhnya karena Untuk pengaduan dari masyarakat yang sudah ditindaklanjuti dapat diselesaikan pada instansi terkait sesuai tupoksi nya sehingga tidak perlu dilakukan rapat atau mediasi di Dinas Lingkungan Hidup.
- ✦ Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, tidak terealisasi karena Untuk pengaduan dari masyarakat yang sudah ditindaklanjuti dapat diselesaikan di lapangan dengan koordinasi pada instansi terkait, sehingga tidak dilakukan pengambilan atau pengujian sampel (air, air limbah, udara Ambient).

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan :

1. Dikarenakan adanya efisiensi anggaran banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Volume sampah yang ada setiap tahunnya semakin meningkat.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.
4. Perlu adanya peningkatan prasarana untuk penanganan sampah.
5. Kurangnya SDM dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai penarik retribusi.
6. Adanya wabah Covid ini, pelaksanaan kegiatan kurang maksimal, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan terkait dengan melibatkan masyarakat.

Upaya-upaya untuk mengatasi masalah :

1. Pada pelaksanaan kegiatan lebih difokuskan kepada pemantauan kualitas air sungai, hal ini dikaitkan dengan pencapaian IKLH Kota Pontianak.
2. Pada saat pengambilan sampel lebih diutamakan sampel yang perioritas yang mendukung data IKLH Kota Pontianak.
3. Untuk menciptakan tertib kebersihan disekitar TPS perlu dilakukan pengawasan dan tindakan agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan aturan sehingga tidak meresahkan masyarakat disekitar TPS.
4. Untuk mengatasi volume sampah yang setiap tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk salah satu upaya yaitu dengan penambahan kendaraan angkutan sampah.
5. Untuk meningkatkan penanganan sampah agar menjadi lebih baik guna mendapatkan Adipura salah satu kegiatan yang mendukung yaitu dengan Peningkatan Prasarana TPA, dengan dilaksanakannya peningkatan jalan TPA, penngkatan rumah magot, pembuatan control landfill dan pembuatan Instalasi Pengolahan Lindi (IPL).
6. Untuk meningkatkan penanganan persampahan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dalam hal ini yaitu container dan landasan container. Diharapkan agar sampah yang berada dilokasi pembuangan tidak sampai meluber ke jalan sehingga mengganggu pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
7. Melakukan penyuluhan tiap-tiap kecamatan yang ditugaskan kepada masyarakat sekitar agar membuang sampah tepat pada waktunya dan dilokasi yang seharusnya, dengan melakukan pemilahan sebelum dilakukan pembuangan. Selain itu memberi teguran lisan kepada masyarakat yang membuang sampah diluar jam pembuangan oleh penjaga TPS.
8. Menghimbau seluruh Calon Sekolah Adiwiyata tetap melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah, mengingat pelaksanaan Program Adiwiyata sangat berpusat pada warga sekolah (pendidik, peserta didik, forum orang tua murid, kantin, warga sekitar dan sejumlah OPD terkait).

2	11	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Materi-SEPS	Jangka waktu (Mekanismen Matriani); SEPD	44 bulan	42 bulan	42 bulan	42 bulan	100%	42 bap	42 bap	100%
2	11	01	2	02	05	Koordinasi dan Pelaksanaan Layanan Keuangan Akta Tahun SEPD	Jumlah Laporan Keuangan Akta Tahun SEPD	4 bap	3 bap	3 bap	3 bap	100%	3 bap	3 bap	100%
2	11	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyajian Status Tanggung Jawab	Jumlah bahan tanggapan penyelesaian yang dibuat dan diinputkan	6 bahan	4 bahan	4 bahan	4 bahan	100%	4 bap	4 bap	100%
2	11	01	2	02	07	Koordinasi dan Pelaksanaan Layanan Keuangan Tahunan Tawalan / Laporan (GUD)	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan Laporan / Laporan GUD	02 bap	01 bap	01 bap	01 bap	100%	01 bap	01 bap	100%
2	11	01	2	02	08	Pertemuan Pelaporan dan Analisis Keuangan Keuangan Anggaran	Jumlah laporan Keuangan Tahunan Anggaran atau lainnya	4 bap	3 bap	3 bap	3 bap	100%	03 bap	03 bap	100%
2	11	01	2	03	01	Akuntansi Ekspedient Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibuat akuntansi keuangan	101	101	101	101	100%	101	101	100%
2	11	01	2	03	02	Pengadaan Pakan Dinas Beras Akutal Kalimantan	Jumlah paket beras dinas perkegiatan	347 unit	101 unit	101 unit	101 unit	100%	102 unit	102 unit	100%
2	11	01	2	03	03	Bantuan Dana Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Dinas Persepsi Daerah	Jumlah ASN yang selesai masuk	30 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100%	3 orang	3 orang	100%
2	11	01	2	06	01	Pelayanan Keperawatan Instalasi Link Perawatan Kesehatan Kantor	Jangka waktu pelayanan keperawatan terhadap link perawatan kesehatan kantor	44 bulan	42 bulan	42 bulan	42 bulan	100%	42 bulan	42 bulan	100%
2	11	01	2	06	02	Pelayanan Perawatan dan Pemeriksaan Keperawatan	Jumlah unit pelayanan dan pemeriksaan kantor yang disediakan	11.704 unit	3.041 unit	3.041 unit	3.041 unit	100%	11 bulan	11 bulan	100%
2	11	01	2	06	03	Pelayanan Perawatan Tumbuh Kembang	Jumlah unit pelayanan tumbuh kembang yang disediakan	620 unit	1.067 unit	1.067 unit	1.067 unit	100%	11 bulan	11 bulan	100%
2	11	01	2	06	04	Pelayanan Rehab Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	40 bulan	42 bulan	42 bulan	42 bulan	100%	42 bulan	42 bulan	100%
2	11	01	2	06	05	Pelayanan Bering Cerdas dan Pencapaian	Jangka waktu penyediaan bering cerdas dan pencapaian	41 bulan	42 bulan	42 bulan	42 bulan	100%	42 bulan	42 bulan	100%
2	11	01	2	06	06	Pelayanan Rehab Rumah dan Peraturan Perundang-Undangan Perencanaan Raper Koordinasi dan Komitansi SEPD	Jangka waktu penyediaan bahan rumah dan peraturan perundang-undangan	40 bulan	42 bulan	42 bulan	42 bulan	100%	42 bulan	42 bulan	100%
2	11	01	2	06	09	Pelayanan Rehab Raper Koordinasi dan Komitansi SEPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan komitansi SEPD yang dilaksanakan	44 bulan	42 bulan	42 bulan	42 bulan	100%	42 bulan	42 bulan	100%
2	11	01	2	07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Dinas Persepsi Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Dinas Persepsi Daerah	102 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	41 unit	41 unit	100%
2	11	01	2	07	04	Pengadaan Kendaraan Persepsi Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Persepsi Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	1 unit	1 unit	-	100%	-	-	100%
2	11	01	2	07	10	Pengadaan Rumah dan Fasilitas Gedung Kantor plus Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Rumah dan Fasilitas Gedung Kantor plus Bangunan Lainnya	101 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	41 unit	41 unit	100%

2	11	01	2	08	Penyediaan Jasa Pemangung Urusan Perantara Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Pemangung Urusan Perantara Daerah	92	48	48	48	100%	42 bulan	42 bulan	100%	
2	11	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Paket Masyarakat	Jangka waktu penyediaan jasa paket masyarakat	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	11	07	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi internet, telepon, air dan listrik	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	11	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Periklanan dan Pemasaran Kantor	Jangka waktu Penyediaan Jasa Periklanan (jkr) Pemasaran Kantor	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	11	03	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	11	01	2	09		Pembinaan Bidang Nihil Daerah Pemungutan Urusan Perantara Daerah	Jumlah bidang nihil daerah pemungutan urusan perantara daerah yang dipelihar	50	100	100	100	100%	47	53	100%
2	11	04	2	09	01	Penyediaan Jasa Perbaikan, Biaya Perbaikan dan Pajak Kendaraan Perantara Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perantara Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihar	44 unit	11 unit	11 unit	11 unit	100%	12 unit	12 unit	100%
2	11	07	2	09	02	Penyediaan Jasa Perbaikan, Biaya Perbaikan, Pajak dan Periklanan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihar	166 unit	445 unit	445 unit	445 unit	100%	445 unit	445 unit	100%
2	11	04	2	09	03	Pembinaan Kelembagaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pembinaan Kelembagaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
2	11	07	2	09	04	Pembinaan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jangka waktu Pembinaan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	11	02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	02	2	01		Kontinu Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 doc	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 doc	1 doc	100%
2	11	02	2	04	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Kota	Jumlah dokumen dan penetapan RPPLH	1 doc	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 doc	1 doc	100%
2	11	02	2	05	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten Kota	Pembacaan laporan NIM dan (DOKPLH) dan Disertifikasi dokumen (RPLH dan DOKPLH) bertahap Perum (2014-2016)	-	-	-	-	-	1 doc	1 doc	100%

2	11	04				PROGRAM PEMUNAHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERUBAHAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Penerapan permit usaha yang menggunakan izin lingkungan dan izin PPLH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	04	2	01		Pemenuhan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah permit usaha yang dibuat dan diakui	2.700	500	400	400	100%	500	500	100%	
2	11	04	3	01	01	Analisis Pemenuhan, Kelemban dan Keunggulan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi kebijakan lingkungan	1.470 (rekom)	400 (rekom)	350 (rekom)	350 (rekom)	100%	350 (rekom usaha)	350 (rekom usaha)	100%	
						Pengembangan Kapasitas Pejabat Pegawai Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pegawai Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	2 orang	2 orang	100%	
2	11	04	3	01	02	Pegawai dan/atau Kelemban yang Izin Lingkungan Hidup dan PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah kegiatan usaha yang diteliti	1.000 (rekom usaha)	350 (rekom usaha)	300 (rekom usaha)	300 (rekom usaha)	100%	300 (rekom usaha)	300 (rekom usaha)	100%	
2	11	04	3	01	04	Kelemban dan Keunggulan Pegawai dan Pegawai Tambahan Tipe dan Secara PPLH	Jumlah kegiatan usaha yang telah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	250 (rekom usaha)	00 (rekom usaha)	50 (rekom usaha)	00 (rekom usaha)	100%	00 (rekom usaha)	40 (rekom usaha)	100%	
2	11	07				PROGRAM PENGALIHAN KEBERADAAN MASYARAKAT BUMI ADAT (MBA) KEAGUAN LOKAL DAN/ATAU MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terpaparnya Komunitas Lokal @ Masyarakat sebagai PPLH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	11	07	3	01		Pemertan MHA, Komunitas Lokal, Pengabdian Masyarakat dan/atau MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemertan Komunitas, Masyarakat, Penerimaan Data dan Informasi Pemertan, Kelengkapan MHA Komunitas Lokal atau Pengabdian Masyarakat dan/atau Komunitas Lokal atau Pengabdian Masyarakat dan/atau MHA terkait dengan PPLH	1.000 (orang)	100 (orang)	400 (orang)	400 (orang)	100%	400 (orang)	400 (orang)	100%	

2	11	01	2	01	01	Koordinasi, Sistemasi, Penyajian Data dan Informasi, Pengkajian Kebutuhan MHA, Keefektifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan FFLH	Jumlah peserta kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional	1.000 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%	4 kali	0 org	100%
2	11	07	2	02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengkajian Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan FFLH	Jumlah peserta Festival Budaya, Kampanye, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan FFLH	1.000 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%	400 orang	400 orang	100%
2	11	07	2	02	01	Pembudayaan, Kampanye, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan FFLH	Jumlah peserta kegiatan Hari Lingkungan Hidup Nasional	1.000 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%			100%
2	11	08				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	08	2	01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah peserta Pelatihan, Kampanye dan Kompetisi HDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	300	87	87	87	100%	30	30	100%
2	11	08	2	01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan kompetensi HDM Regi-Daerah Lingkungan	110 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	10 orang	50 orang	100%
							Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan kompetensi HDM Regi-Prinsipal Seka Kabupaten	120 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	100%
2	17	01	2	01	01	Pendampingan Organisasi Peduli Lingkungan Hidup	Tingkat kelengkapan organisasi yang dibantu	14 kelompok	17 kelompok	17 kelompok	17 kelompok	100%	10 kelompok	10 kelompok	100%

2	11/09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase penghargaan lingkungan hidup yang diungg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11/09	2	01	Penerapan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Eselon Kabupaten Kota	jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	100%	-	-	100%
2	11/09	2	02	Penerapan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Desa/Desa Kelurahan Kecamatan	jumlah penghargaan Adipura	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	100%	-	-	100%
					Jumlah penerima 20 tahun Adipura	-	-	-	-	-	20 tahun	20 tahun	100%
					Jumlah penerima Adipura (AW) 100%	-	-	-	-	-	10 tahun	10 tahun	100%
					jumlah SW yang diungg	4	4	4	4	4	100%	100%	100%
2	11/10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11/10	2	01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kota	jumlah kasus yang ditangani	34	34	34	34	100%	-	-	100%
2	11/10	2	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Kota	jumlah pengaduan yang ditangani	14 pengaduan	14 pengaduan	14 pengaduan	14 pengaduan	100%	14 pengaduan	14 pengaduan	100%
				koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Administrasi, Penyelenggaraan, dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup di Luar Wilayah atau melala Peradilan	jumlah kasus yang ditangani	4	4	4	4	4	10 tahun	10 tahun	100%

2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPARAN	Persentase pengumpulan sampah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	11	11	2	01	Pengumpulan Sampah	Jumlah sampah yang dibersihkan (ton)	771.601,48	0	0	0	100%			100%	
2	11	11	2	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen	1 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%	
2	11	11	2	01	02	Pengangkutan Sampah dengan melibatkan Perorangan, Perorangan Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Soc)	Jumlah sampah yang diangkut dengan melibatkan Perorangan, Perorangan Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Soc)	104.107,40 ton	20.125,26 ton	20.125,26 ton	20.125,26 ton	100%	20.125,26 ton	20.125,26 ton	100%
2	11	11	2	01	02	Pengangkutan Sampah dengan melibatkan Perorangan	Jumlah sampah yang diangkut dengan melibatkan Perorangan dan Pengolahan Sampah di TPA/TPST/SPA	404.107,24 ton	114.528,82 ton	114.528,82 ton	114.528,82 ton	100%			100%
						Pengangkutan, Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Jumlah sampah yang diangkut dengan melibatkan Pengangkutan Sampah di TPA/TPST/SPA	404.107,24 ton	114.528,82 ton	114.528,82 ton	114.528,82 ton	100%			100%
							Jumlah sampah yang diangkut dengan melibatkan Pengangkutan Sampah di TPA/TPST/SPA	404.107,24 ton	114.528,82 ton	114.528,82 ton	114.528,82 ton	100%			100%
							Jumlah sampah yang diangkut dengan melibatkan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	404.107,24 ton	114.528,82 ton	114.528,82 ton	114.528,82 ton	100%			100%
						Jumlah sampah yang diangkut	-	-	-	-	114.528,82 ton	114.528,82 ton	100%		
2	11	11	2	01	04	Penggiatan Franchise Masyarakat dalam pengelolaan Persamparan	Jumlah kelompok masyarakat/pelaku usaha dalam pengelolaan sampah	27 kelompok	34 kelompok	34 kelompok	34 kelompok	100%	41 kelompok	41 kelompok	100%
2	11	11	2	01	05	Kemudahan dan Insentif yang Disediakan Pemerintah dan Satuan Perangkat Daerah	Jumlah pemberian Prorogasi dan Fasilitas Pengelolaan Persamparan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
2	11	11	2	01	06	Penyusunan Kebijakan Kinerja Pengelolaan Persamparan	Jumlah laporan kinerja pengelolaan sampah	1 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%

2	II	11	Penelitian dan Pengendalian Sampah / Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pengolahan Akhir Sampah yang Dianggap Baik oleh Warga	Jumlah kegiatan festival	2 kegiatan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
			vi Pelayanan Pemukiman Bersih dan Teratur serta Elektrik	Jumlah fasilitas perumahan kondisi perumahan	-	-	-	-	-	2 kegiatan festival	2 kegiatan festival	100%
			Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Dianggap Baik oleh Warga	Jumlah kegiatan	-	-	-	-	-	2 kegiatan	3 kegiatan	100%
			Fasilitas Perumahan, Kebutuhan dasar dan Standar Taksonomi Perumahan Sampah	Jumlah kegiatan perumahan dan pengawasannya	-	-	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
			Perencanaan dan Pelaksanaan Perumahan Kincir Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Penyusunan dan Pelaksanaan Perumahan Kincir Pengelolaan Sampah	-	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
			Monitoring dan Evaluasi Perumahan Target dan Standar Pelayanan Perumahan Sampah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perumahan Target dan Standar Pelayanan Perumahan Sampah	-	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran target Renstra DLH Tahun 2020-2024, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Standar pelayanan Minimal (SPM). Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutiak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Tabel 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranja Dinas Lingkungan Hidup dan
Capaian Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	Uraian	Target Rencana Dinas Kota Pontianak				Koefisien Capaian		Proyeksi		Catatan/Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	-	52,50	53,50	54,00	54,50	56,05	58,84	54,00	54,50	IKAI : Sumber data dari hasil pemantauan kualitas air sungai III Kota Pontianak (Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Lantek) sebanyak 18 titik.
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	-	81,50	82,50	83,00	83,50	85,75	85,68	83,00	83,50	IKU : Sumber data dari hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kota Pontianak, dengan metode Passive sampler sebanyak 4 titik (2 periode = 8 titik)
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	-	39,60	40,50	41,00	41,50	29,52	27,64	41,00	41,50	IKTL = Sumber data dari citra satelit (data dari Kementerian LHK) + Data RT/RW pada RT/RW Kota Pontianak.

No	Indikator	SDM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra DLH Kota Pontianak				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
4	Persentase Capaian Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	100,6	101,7	103	104	61,90	62,19	65	65	
5	Persentase Penanganan dan Pengurangan Sampah	-	-	100	100	100	100	98	99	99	100	
6	Persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup	-	-	50	60	65	75	60	65	70	75	
7	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan	-	-	50	60	70	80	-	-	70	80	
8	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima	-	-	50	50	60	60	-	-	60	60	
9	Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	-	-	100	100	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Diperoleh isu strategis seperti dijelaskan dibawah ini :

1) Kapasitas SDM DLH Kota Pontianak

Peningkatan kapasitas pegawai baik dari sisi mindset maupun pengetahuan formal. Perkembangan teknologi dan teknik pemantauan serta pengelolaan pencemaran lingkungan ini tidak mau menuntut pegawai yang paham akan perkembangan teknologi terkait lingkungan hidup. Oleh karena itu, Kompetensi Pegawai DLH menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung Visi Kepala daerah.

2) Pencemaran Udara, Air dan Tanah

Sejalan dengan perkembangan Kota yang sedemikian pesatnya saat ini maupun di masa depan, Kota Pontianak dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan pencemaran baik udara, air dan tanah. Pencemaran air berasal dari aktivitas kegiatan usaha dan masyarakat, pencemaran udara dari aktifitas kendaraan bermotor dan buangan cerobong kegiatan usaha, sedangkan pencemaran tanah berasal dari tumpukan sampah yang menghasilkan limfida yang dapat mengkontaminasi tanah, pembakaran lahan yang menurunkan derajat kesuburan tanah, dan aktifitas lain yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah.

3) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang dengan pesat permasalahan lingkungan tak pelak merupakan problem yang sekarang ini mulai muncul. Pembangunan kota Pontianak harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan melingkupi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) serta perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Hal ini untuk memastikan bahwa di masa depan lingkungan tetap dapat dinikmati generasi penerus dengan kualitas yang baik.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tersebut DLH Kota Pontianak menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan DLH, diantaranya adalah :

1. Banyaknya sarana dan prasarana yang rusak dan tidak layak pakai.
2. Terbatasnya kemampuan SDM dalam hal teknis pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan kendaraan angkutan sampah sarana prasarana lingkungan.
3. Ketersediaan anggaran yang kurang sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup yang sangat cepat.
4. Meningkatnya kepadatan dan jumlah penduduk, pesatnya perkembangan aktivitas transportasi dan usaha industri yang mengakibatkan meningkatnya volume limbah sampah dan pencemaran lingkungan.
5. Terbatasnya SDM Fungsional untuk penyuluhan kepada masyarakat.
6. Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan lingkungan secara mandiri.

7. Meningkatnya pencemaran air, dimana limbah industri dan limbah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar pencemaran air.
8. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap wawasan lingkungan.

Dalam menanggapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka DLH Kota Pontianak berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalikan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselesaikan tugas pokok dan fungsi DLH Kota Pontianak dengan optimal.

Adapun tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain :

- 1) Volume sampah yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
- 2) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap membuang sampah pada tempatnya, pemilahan sampah dan jadwal pembuangan sampah.
- 3) Sering terjadinya kemacetan lalu lintas, sebagai akibat rendahnya kesadaran berlalu lintas yang membahayakan PHL yang sedang bertugas.
- 4) Sulitnya merubah perilaku para pengusaha dan masyarakat terhadap pentingnya pengendalian pencemaran.
- 5) Meningkatnya para pelaku usaha yang berdampak pada pencemaran lingkungan.
- 6) Kurangnya dukungan dan kesadaran dari pemilik usaha maupun masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan menaati aturan yang sudah dikeluarkan.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan :

- 1) Komitmen yang kuat dari Walikota Pontianak untuk mewujudkan Pontianak kota yang bersih dan berwawasan lingkungan.
- 2) Dukungan dari pihak Legislatif Kota Pontianak.
- 3) Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebersihan yang makin meningkat.
- 4) Sampah dapat dikurangi (Reduce), dapat digunakan kembali (Reuse) dan dapat didaur ulang (Recycle).
- 5) Meningkatkan penindakan terhadap kegiatan usaha yang melanggar peraturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- 6) Melakukan pelatihan terhadap staff yang ada dengan tujuan memaksimalkan fungsi dengan jumlah pegawai yang ada.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD 2022, setelah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD, maka terdapat beberapa catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, yaitu terdapat sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2021, 2022 akan tetapi dilaksaaakan di Tahun berikutnya yaitu Tahun 2023 diantaranya :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Kegiatan : Pemilihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota

- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Rehabilitasi
- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Restorasi

Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan di tahun 2021 dikarenakan di tahun 2021 baru dilaksanakan tahap kegiatan penanggulangan pencemaran sedangkan kegiatan pemulihan dilakukan hanya sebata penghentian Sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, sedangkan 3 Sub Kegiatan diatas dilaksanakan bertahap ditahun 2023.

2. Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Pada sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021 tetapi akan dilaksanakan ditahun 2022 dan 2023.

3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Tahun 2021 untuk Sub kegiatan Pembuatan KLHS Rencana Tata Ruang dan KLHS RPMD telah dilaksanakan oleh OPD lain maka akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2023.

Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kritisitas					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENTING DAN URGANS PEMBERANTARAN KEKAWAHLAN (BENEFISIARIS) KOTA	Kota Ptk	Persentase tingkat kepuasan Bidang Regenerasi terhadap pelayanan Keseluruhan	100%	15.871.224.500	PROGRAM PENTING DAN URGANS PEMBERANTARAN KEKAWAHLAN (BENEFISIARIS) KOTA	Kota Ptk	Persentase tingkat kepuasan Bidang Regenerasi terhadap pelayanan Keseluruhan	100%	15.871.224.500	-
1	Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ptk	Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 dokumen	208.969.400	Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ptk	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	14 dokumen	208.969.400	-
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	55.105.000	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	55.105.000	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SEPD	Kota Ptk	Jumlah Dokumen RKA-SEPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SEPD	1 Dokumen	55.055.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SEPD	Kota Ptk	Jumlah Dokumen RKA-SEPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SEPD	1 Dokumen	55.055.200	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SEPD	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SEPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SEPD	1 Dokumen	55.122.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SEPD	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SEPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SEPD	1 Dokumen	55.122.000	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Kota Ptk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	55.712.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Kota Ptk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	55.712.000	-
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ptk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	49.870.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ptk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	49.870.800	-

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK											
No	Rencana Kerja RPJPD					Realisasi Anggaran E. Realisasi					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Kota Ptk	Jangka waktu penyusunan administrasi keuangan peringkat daerah	12 bulan	11.923.000.000	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Kota Ptk	Persentase penyusunan administrasi keuangan Peringkat Daerah	12 bulan	11.923.000.000	-
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ptk	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Orang/bulan	11.294.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ptk	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Orang/bulan	11.294.000.000	-
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	999.240.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	999.240.000	-
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.017.400	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.017.400	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ptk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.113.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ptk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.113.700	-
5	Pengadaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Perencanaan	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Perencanaan dan Tindakan Lanjut Perencanaan	1 Dokumen	4.884.300	Pengadaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Perencanaan	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Perencanaan dan Tindakan Lanjut Perencanaan	1 Dokumen	4.884.300	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester / Keuangan SKPD	Kota Ptk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD	12 Laporan	11.541.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD	Kota Ptk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD	12 Laporan	11.541.800	-
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Programis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Programis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.790.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Programis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Programis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.790.800	-

RINIS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK											
No	Rencana Awal SEPD					Realisasi Akhir Sehubungan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Uraian Capaian	Pagu Anggaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pengeluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Ptl	Jumlah ASN yang dikelola (administrasi) kepegawaian	80 orang	23.942.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Ptl	Persentase pemenuhan administratif kepegawaian perangkat daerah	90 orang	23.942.000	-
3	Pengadaan Timan Darat Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Ptl	Jumlah Paket Pekerjaan dalam Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	11.400.000	Pengadaan Pakan Timan Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Ptl	Jumlah dokumen laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	11.400.000	-
4	Hubungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Ptl	Jumlah Orang yang Mengikuti Sertifikasi Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	Hubungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Ptl	Jumlah dokumen laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Orang	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Ptl	Jangka Malam Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 malam	887.888.728	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Ptl	Persentase pemenuhan administratif umum perangkat daerah	12 malam	887.888.728	-
10	Penyediaan Komputer Berjenis Linih, Perantara Jaringan, Kabel	Kota Ptl	Jumlah Paket Komputer Berjenis Linih, Perantara Jaringan, Bermanas Kabel yang Disediakan	1 Paket	41.788.000	Penyediaan Komputer Berjenis Linih, Perantara Jaringan, Kabel	Kota Ptl	Jumlah Paket Komputer Berjenis Linih, Perantara Jaringan, Bermanas Kabel yang Disediakan	1 Paket	41.788.000	-
14	Penyediaan Fasilitas dan Peralengkapan Kantor	Kota Ptl	Jumlah Paket Fasilitas dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	344.036.300	Penyediaan Fasilitas dan Peralengkapan Kantor	Kota Ptl	Jumlah Paket Fasilitas dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	344.036.300	-
12	Penyediaan Fasilitas Tanah Tangga	Kota Ptl	Jumlah Paket Fasilitas Tanah Tangga yang Disediakan	1 Paket	111.078.000	Penyediaan Fasilitas Tanah Tangga	Kota Ptl	Jumlah Paket Fasilitas Tanah Tangga yang Disediakan	1 Paket	111.078.000	-
11	Penyediaan Paket Laporan Kantor	Kota Ptl	Jumlah Paket Laporan Laporan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.100.000	Penyediaan Paket Laporan Kantor	Kota Ptl	Jumlah Paket Laporan Laporan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.100.000	-
14	Penyediaan Ruang Cetak dan Pengarsipan	Kota Ptl	Jumlah Paket Ruang Cetak dan Pengarsipan yang Disediakan	1 Paket	162.036.400	Penyediaan Ruang Cetak dan Pengarsipan	Kota Ptl	Jumlah Paket Ruang Cetak dan Pengarsipan yang Disediakan	1 Paket	162.036.400	-
12	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-Undangan	Kota Ptl	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.040.000	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-Undangan	Kota Ptl	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.040.000	-
16	Pengembangan Laporan Komitmen dan Kesediaan SEPD	Kota Ptl	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Laporan Komitmen dan Kesediaan SEPD	1 Laporan	171.178.000	Pengembangan Laporan Komitmen dan Kesediaan SEPD	Kota Ptl	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Laporan Komitmen dan Kesediaan SEPD	1 Laporan	171.178.000	-
1	Hubungan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SEPD	Kota Ptl	Jumlah Dokumen Hubungan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SEPD	1 Dokumen	111.000.000	Hubungan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SEPD	Kota Ptl	Jumlah Dokumen Hubungan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SEPD	1 Dokumen	111.000.000	-

RENCANA LENCINGAN ANH HIDUP KOTA PONTIANAK

No	Rencana Awal RPPU					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja	Target Capaian	Page Indikasi	Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja	Target Capaian	Page Indikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengadaan Bawang Merah	Kota	Persediaan persediaan bawang	4 ton	125.100.000	-
						Daerah Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah	Pra	Daerah pemangjang urusan pemerintah daerah			
						Pengedinan Rumah dan Pemasangan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota	Jumlah Unit Rumah dan Pemasangan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	115.100.000	-
8	Persediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pk	Jumlah Waktu Persediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	1.024.000.000	Persediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pk	Persentase persediaan jasa pemangjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	1.024.000.000	-
9	Persediaan Jasa Surat Menerima	Kota Pk	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Surat Menerima	1 Laporan	25.500.000	Persediaan Jasa Surat Menerima	Kota Pk	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Surat Menerima	1 Laporan	25.500.000	-
10	Persediaan Jasa Komunikasi, Transfer Daya Air dan Listrik	Kota Pk	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Komunikasi, Transfer Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	400.000.000	Persediaan Jasa Komunikasi, Transfer Daya Air dan Listrik	Kota Pk	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Komunikasi, Transfer Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	400.000.000	-
11	Persediaan Jasa Swastana Air Perumahan Kanton	Kota Pk	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Swastana Air Perumahan Kanton yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	Persediaan Jasa Swastana Air Perumahan Kanton	Kota Pk	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Swastana Air Perumahan Kanton yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	-
12	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kanton	Kota Pk	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kanton yang Disediakan	1 Laporan	1.337.000.000	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kanton	Kota Pk	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kanton yang Disediakan	1 Laporan	1.337.000.000	-
8	Pembelian Bawang Merah Daerah Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pk	Jumlah bawang merah daerah pemangjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	274 ton	475.310.400	Pembelian Bawang Merah Daerah Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pk	Persentase pembelian bawang merah daerah pemangjang urusan pemerintah daerah	274 ton	475.310.400	-
13	Persediaan Jasa Perumahan, Biaya Perumahan dan Pajak Kanton Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pk	Jumlah Kebutuhan Perumahan Dinas atau Kebutuhan Dinas lainnya yang dipelihara dan disediakan dan disediakan	10 Unit	133.410.000	Persediaan Jasa Perumahan, Biaya Perumahan dan Pajak Kanton Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pk	Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	133.410.000	-
14	Persediaan Jasa Perumahan, Biaya Perumahan, Pajak dan Pemeliharaan Kanton Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pk	Jumlah Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan disediakan dan disediakan	01 Unit	44.700.000	Persediaan Jasa Perumahan, Biaya Perumahan, Pajak dan Pemeliharaan Kanton Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pk	Jumlah Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan disediakan dan disediakan	01 Unit	44.700.000	-
15	Persediaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan disediakan	1 Unit	100.500.000	Persediaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan disediakan	1 Unit	100.500.000	-
16	Persediaan Rehabilitasi Rumah dan Pemasangan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pk	Jumlah Rumah dan Pemasangan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan disediakan	10 Unit	40.100.000	Persediaan Rehabilitasi Rumah dan Pemasangan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pk	Jumlah Rumah dan Pemasangan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan disediakan	10 Unit	40.100.000	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Awal RPSP			Realisasi Akhir RPSP					
			Melalui Laporan	Tingkat Capaian	Realisasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Realisasi	Volume Peningkatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota PK	Perencanaan perancangan Kabupaten Hidup	100%	245.204.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota PK	Perencanaan perancangan Kabupaten Hidup	100%	245.204.000	-
7	Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLEH) Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Dokumen Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	73.275.000	Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLEH) Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Dokumen Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLEH)	2 Dokumen	73.275.000	-
10	Penyusunan dan Penetapan RPPLEH Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Skema (Dok) Penyusunan dan Penetapan RPPLEH Kabupaten Kota yang Ditujukan	1 Dokumen	11.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLEH Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Skema (Dok) Penyusunan dan Penetapan RPPLEH Kabupaten Kota yang Ditujukan	1 Dokumen	11.000.000	-
11	Penerbitan Peraturan RPPLEH Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Dokumen Terbitan Kebijakan yang Telah Menganalisa RPPLEH Kabupaten Kota	1 Dokumen	62.275.000	Penerbitan Peraturan RPPLEH Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Dokumen Terbitan Kebijakan yang Telah Menganalisa RPPLEH Kabupaten Kota	1 Dokumen	62.275.000	-
8	Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Kota PK	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	1 Dokumen	171.931.000	Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Kota PK	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kota	1 Dokumen	171.931.000	-
20	Pembuatan dan Pelaksanaan KLIH serta KPI yang Berpotensi Mendukung Daerah Kerja Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen KLIH KPI Kabupaten Kota yang Berpotensi Mendukung Daerah Kerja Lingkungan Hidup yang Ditujukan	1 Dokumen	171.931.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLIH serta KPI yang Berpotensi Mendukung Daerah Kerja Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen KLIH KPI Kabupaten Kota yang Berpotensi Mendukung Daerah Kerja Lingkungan Hidup yang Ditujukan	1 Dokumen	171.931.000	-
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN RENCANA KEBERUKAN	Kota PK	Perencanaan pengendalian pencemaran	60%	811.154.885	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN RENCANA KEBERUKAN	Kota PK	Perencanaan pengendalian pencemaran	60%	811.154.885	-
8	Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah upaya pemertanian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1 upaya pemertanian	811.154.885	Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 upaya pemertanian	811.154.885	-
19	Lociditas, Sertifikasi dan Pelaksanaan Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Indikator Mutu Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota PK	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Berdasarkan Indikator Mutu Tanah, Air, Udara dan Laut	2 Dokumen	283.500.000	Kesertifikasi, Sertifikasi dan Pelaksanaan Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Indikator Mutu Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota PK	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Berdasarkan Indikator Mutu Tanah, Air, Udara dan Laut	2 Dokumen	283.500.000	-
20	Koordinasi, Sertifikasi dan Pelaksanaan Pengendalian Limbah (da) Rumah Kota Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota PK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sertifikasi pemertanian (da) Rumah Kota Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang Ditujukan	1 Dokumen	20.500.000	Koordinasi, Sertifikasi dan Pelaksanaan Pengendalian Limbah (da) Rumah Kota Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota PK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sertifikasi pemertanian (da) Rumah Kota Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang Ditujukan	1 Dokumen	20.500.000	-
21	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Pengawasan Control UJ, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Ditujukan	10 Dokumen	7.500.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Pengawasan Control UJ, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Ditujukan	10 Dokumen	7.500.000.000	-

No	Rencana Kerja RPJPD					Rincian Anggaran Pendapatan					Detail Pening
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tipe Capaian	Page Indikasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tipe Capaian	Page Indikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Peningkatan Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Kota Pk	Jumlah media lingkungan yang dipasang	1 media lingkungan	173.200.700	Peningkatan Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Kota Pk	Jumlah Adanya Peningkatan Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	3 media lingkungan	173.200.700	
11	Pendidikan Informasi Partisipasi Masyarakat dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Pk	Jumlah Laporan Sosialisme Informasi Peningkatan Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten Kota yang Dibutuhkan	12 Laporan	11.200.000	Pendidikan Informasi Partisipasi Masyarakat dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Pk	Jumlah Laporan Sosialisme Informasi Peningkatan Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten Kota yang Dibutuhkan	12 Laporan	11.200.000	-
12	Pengolahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pk	Jumlah Lokasi Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diteliti	21 lokasi	98.999.900	Pengolahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pk	Jumlah Lokasi Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diteliti	21 lokasi	98.999.900	-
13	Pengawasan Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pk	Jumlah Sasaran Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diteliti	1 titik	10.000.000	Pengawasan Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pk	Jumlah Sasaran Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diteliti	1 titik	10.000.000	-
14	Pemulihan Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Kota Pk	Jumlah upaya Pemulihan Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 upaya pemulihan	64.800.000	Pemulihan Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Kota Pk	Jumlah Adanya Pemulihan Pemantauan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	1 upaya pemulihan	64.800.000	
15	Koordinasi dan Sinergisasi Pengawasan Sumber Pencemaran	Kota Pk	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pengawasan Sumber Pencemaran Keseluruhan Pemerintah dan atau Provinsi dan atau Sektor Lainnya Terutama Sumber Pencemaran yang Dibutuhkan	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinergisasi Pengawasan Sumber Pencemaran	Kota Pk	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pengawasan Sumber Pencemaran Keseluruhan Pemerintah dan atau Provinsi dan atau Sektor Lainnya Terutama Sumber Pencemaran yang Dibutuhkan	1 Dokumen	20.000.000	-
16	Koordinasi dan Sinergisasi Pemberdayaan Usaha Perikanan	Kota Pk	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pemberdayaan Usaha Perikanan	1 Dokumen	14.800.000	Koordinasi dan Sinergisasi Pemberdayaan Usaha Perikanan	Kota Pk	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pemberdayaan Usaha Perikanan	1 Dokumen	14.800.000	-

No.	Rancangan Awal RUPD					Rincian Anggaran Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEARIFAN BUDAYA RAYATI (KEHATI)	Kota Ptk	Persentase pengelolaan kearifan budaya rayati (KEHATI)	100%	42.872.500	PROGRAM PENGELOLAAN KEARIFAN BUDAYA RAYATI (KEHATI)	Kota Ptk	Persentase pengelolaan kearifan budaya rayati (KEHATI)	100%	42.872.500	-
12	Pengelolaan Kearifan Budaya Rayati Kabupaten Kota	Kota Ptk	Terwujudnya tatanan KEHATI	1 lokasi	42.872.500	Pengelolaan Kearifan Budaya Rayati Kabupaten Kota	Kota Ptk	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan KEHATI	1 lokasi	42.872.500	-
13	Penyusunan dan Penerapan Rencana Pengelolaan Kearifan Budaya Rayati	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Rencana Indek Pengelolaan Keahati yang Ditaman	1 dokumen	42.872.500	Penyusunan dan Penerapan Rencana Pengelolaan Kearifan Budaya Rayati	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Rencana Indek Pengelolaan Keahati yang Ditaman	1 dokumen	42.872.500	-
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH BB)	Kota Ptk	Persentase Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (BB) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah BB)	100%	113.201.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH BB)	Kota Ptk	Persentase Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (BB) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah BB)	100%	113.201.000	-
15	Penyiapanan Sementara Limbah BB	Kota Ptk	Jumlah kegiatan	15 kegiatan	113.201.000	Penyiapanan Sementara Limbah BB	Kota Ptk	Jumlah Dokumen Penyiapanan Sementara Limbah BB yang terbellini	15 kegiatan	113.201.000	-
16	Fasilitas Pemisahan Kembali dan Penyediaan Sementara Limbah BB Ditukarkan melalui Sistem Pelayanan Pemisahan Beracun Terintegrasi secara Elektronik	Kota Ptk	Jumlah Fasilitas Penyediaan dan Penyediaan sementara Limbah BB yang Ditukarkan melalui Sistem Pelayanan Pemisahan Beracun Terintegrasi secara Elektronik	1 Dukungan	43.734.000	Fasilitas Pemisahan Kembali dan Penyediaan Sementara Limbah BB Ditukarkan melalui Sistem Pelayanan Pemisahan Beracun Terintegrasi secara Elektronik	Kota Ptk	Jumlah Fasilitas Penyediaan dan Penyediaan sementara Limbah BB yang Ditukarkan melalui Sistem Pelayanan Pemisahan Beracun Terintegrasi secara Elektronik	1 Dukungan	43.734.000	-
20	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemisahan Beracun Administrasi dan Tatanan Penyediaan Sementara Limbah BB	Kota Ptk	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemisahan Sementara Penyediaan dan Penyediaan Sementara Limbah BB	10 Laporan	40.677.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemisahan Beracun Administrasi dan Tatanan Penyediaan Sementara Limbah BB	Kota Ptk	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemisahan Sementara Penyediaan dan Penyediaan Sementara Limbah BB	10 Laporan	40.677.000	-

No	Komitmen Awal RKPD					Hasil Akhir Ketahanan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota PA	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	18.696.000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota PA	Jumlah kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	18.696.000	-
46	Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan dan Pengumpulan Limbah B3 Didukung melalui Sistem Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota PA	Jumlah Fasilitas Pemenuhan dan Pengumpulan Limbah B3 yang Didukung melalui Sistem Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	11.440.000	Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan dan Pengumpulan Limbah B3 Didukung melalui Sistem Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota PA	Jumlah Fasilitas Pemenuhan dan Pengumpulan Limbah B3 yang Didukung melalui Sistem Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	11.440.000	-
43	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengalihan, dan atau Pembuangan	Kota PA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengalihan, dan atau Pembuangan yang Bermanfaat Mendapat Kesepakatan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengangkutan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kesepakatan	1 Dokumen	8.040.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengalihan, dan atau Pembuangan	Kota PA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengalihan, dan atau Pembuangan yang Bermanfaat Mendapat Kesepakatan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengangkutan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kesepakatan	1 Dokumen	8.040.000	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Pemerintah Asal APBD			Realisasi Anggaran			Target Capaian (%)	Page-Indikator	Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Page-Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Page-Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PERHIMPATAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RIBUT PPLH	Kota PA	Penerapan pelatir gratis yang menyertakan foto lingkungan dan foto PPLH	100%	188.027.800	PROGRAM PERHIMPATAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RIBUT PPLH	Kota PA	Penerapan pelatir gratis yang menyertakan foto lingkungan dan foto PPLH	100%	188.027.800	
15	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ada Lingkungan dan/atau PPLH di wilayah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Kota PA	Jumlah pelatir gratis yang dibina dan disertai	145 pelatir gratis	188.027.800	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ada Lingkungan dan/atau PPLH di wilayah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Kota PA	Jumlah dibina dan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ada Lingkungan dan/atau PPLH di wilayah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	145 pelatir gratis	188.027.800	-
6	Kelembagaan Pemertanian, Kependidikan, dan Kesehatan dan Lingkungan dan/atau PPLH	Kota PA	Jumlah Rekomendasi dan/atau Perencanaan Teknik, Perencanaan Lingkungan, dan Saran Kebijakan Operasional yang Dibuatkan	10 Dokumen	44.799.000	Kelembagaan Pemertanian, Kependidikan, dan Kesehatan dan Lingkungan dan/atau PPLH	Kota PA	Jumlah Rekomendasi dan/atau Perencanaan Teknik, Perencanaan Lingkungan, dan Saran Kebijakan Operasional yang Dibuatkan	10 Dokumen	44.799.000	-
41	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kota PA	Jumlah Rekomendasi dan/atau Perencanaan Teknik, Perencanaan Lingkungan, dan Saran Kebijakan Operasional yang Dibuatkan	1 orang	-	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kota PA	Jumlah Rekomendasi dan/atau Perencanaan Teknik, Perencanaan Lingkungan, dan Saran Kebijakan Operasional yang Dibuatkan	1 orang	-	-
42	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Ada Lingkungan Hidup dan PPLH yang Diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Kota PA	Jumlah Laporan Dan/atau Any other Laporan yang Dibuatkan dan/atau Lingkungan, Perencanaan Lingkungan, dan Saran Kebijakan Operasional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	101 Laporan	42.742.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Ada Lingkungan Hidup dan PPLH yang Diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Kota PA	Jumlah Laporan Dan/atau Any other Laporan yang Dibuatkan dan/atau Lingkungan, Perencanaan Lingkungan, dan Saran Kebijakan Operasional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	101 Laporan	42.742.000	
43	Kelembagaan dan Rekomendasi Pemertanian dan Perikanan Sanksi Operasi dan Rencana PPLH	Kota PA	Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi dan Rekomendasi Pengawasan dan Perencanaan Sanksi Operasi dan Rencana PPLH	1 Dokumen	44.200.000	Kelembagaan dan Rekomendasi Pemertanian dan Perikanan Sanksi Operasi dan Rencana PPLH	Kota PA	Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi dan Rekomendasi Pengawasan dan Perencanaan Sanksi Operasi dan Rencana PPLH	1 Dokumen	44.200.000	-

No	Rencana Awal RFPD					Realisasi/Analisa Pelaksanaan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian	Indikator/Kinerja	Target Capaian	Uraian/Realisasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian	Indikator/Kinerja	Target Capaian	Uraian/Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENINGKATAN PENDUKUN PELATIHAN DAN KONSULTAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota PK	Peningkatan pengetahuan kapasitas sahayanya untuk peduli lingkungan	100%	2.211.154.150	PROGRAM PENINGKATAN PENDUKUN PELATIHAN DAN KONSULTAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota PK	Peningkatan pengetahuan kapasitas sahayanya untuk peduli lingkungan	100%	2.211.154.150	
16	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Peningkatan Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota PK	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat dan Peningkatan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100 orang	2.211.154.150	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Peningkatan Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota PK	Jumlah Peserta Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Peningkatan Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 orang	2.211.154.150	
16	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Kota PK	Jumlah Lembaga/lembaga Masyarakat/instansi yang Terdapat yang Memiliki Kapasitas dan Kompetensi Terdas PPLH	1 lembaga	15.844.150	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Kota PK	Jumlah Lembaga/lembaga Masyarakat/instansi yang Terdapat yang Memiliki Kapasitas dan Kompetensi Terdas PPLH	1 lembaga	15.844.150	
17	Peningkatan Gerakan (Peduli Lingkungan Hidup)	Kota PK	Jumlah Peningkatan Perilaku Gerakan Peduli dan Bertindak Lingkungan Hidup yang Dokumentasi	1 Aksi/aksi	110.190.150	Peningkatan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota PK	Jumlah Peningkatan Perilaku Gerakan Peduli dan Bertindak Lingkungan Hidup yang Dokumentasi	1 Aksi/aksi	110.190.150	
18	Peningkatan Peningkatan dan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kota PK	Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup yang peduli	150 orang	71.899.800	Peningkatan Peningkatan dan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kota PK	Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup yang peduli	150 orang	71.899.800	
	PROGRAM PENGHABILAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota PK	Peningkatan pengurangan lingkungan hidup yang rusak	100%	221.529.800	PROGRAM PENGHABILAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota PK	Peningkatan pengurangan lingkungan hidup yang rusak	100%	221.529.800	
17	Pemberian Pendidikan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota PK	Jumlah peserta pelatihan yang Lingkungan Hidup	18 peserta	221.529.800	Pemberian Pendidikan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota PK	Jumlah Peserta Pelatihan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18 peserta	221.529.800	
18	Pendidikan Warga Masyarakat Lembaga Masyarakat Desa/ Desa Perkotaan/Perkampungan Pedukuhan dan Penghulu Lingkungan Hidup	Kota PK	Jumlah Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Desa/ Desa Perkotaan/ Perkampungan Pedukuhan/ Penghulu yang Dapat Kapasitas dan Kompetensi PPLH	4 orang	221.529.800	Pendidikan Warga Masyarakat Lembaga Masyarakat Desa/ Desa Perkotaan/ Perkampungan Pedukuhan dan Penghulu Lingkungan Hidup	Kota PK	Jumlah Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Desa/ Desa Perkotaan/ Perkampungan Pedukuhan/ Penghulu yang Dapat Kapasitas dan Kompetensi PPLH	4 orang	221.529.800	

REVISI LINGKUP DAN HIMPUNAN RENCANA PEKERJAAN

No	Rencana Awal RKPD					Revisi Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMANGKASAN PENYALURAN LINGKUPAN HIMPUNAN	Kota PK	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Himpun	100%	48.121.500	PROGRAM PEMANGKASAN PENYALURAN LINGKUPAN HIMPUNAN	Kota PK	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Himpun	100%	48.121.500	-
10	Pembelajaran Pegawai Madya dan Bawah, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat (PDM) Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah kelas yang diselenggarakan	78 kelas	38.121.500	Pembelajaran Pegawai Madya dan Bawah, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat (PDM) Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah pegawai yang ditugaskan	78 kelas	38.121.500	-
20	Pengabdian Pegawai Madya dan Bawah (PDM) Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Pengabdian Masyarakat (PDM) Kabupaten Kota yang dilaksanakan	1 Dokumen	28.121.500	Pengabdian Pegawai Madya dan Bawah (PDM) Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Pengabdian Masyarakat (PDM) Kabupaten Kota yang dilaksanakan	1 Dokumen	28.121.500	-
31	Koordinasi dan Sinergisasi Pemerintah Daerah, Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kota dan/atau Penyelenggaraan Himpun dan/atau Penyelenggaraan Himpun dan/atau Penyelenggaraan Himpun dan/atau Penyelenggaraan Himpun	Kota PK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pemerintah Daerah, Administrasi, Keuangan, dan/atau Penyelenggaraan Himpun dan/atau Penyelenggaraan Himpun dan/atau Penyelenggaraan Himpun	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Sinergisasi Pemerintah Daerah, Administrasi, Keuangan, dan/atau Penyelenggaraan Himpun dan/atau Penyelenggaraan Himpun dan/atau Penyelenggaraan Himpun	Kota PK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pemerintah Daerah, Administrasi, Keuangan, dan/atau Penyelenggaraan Himpun dan/atau Penyelenggaraan Himpun dan/atau Penyelenggaraan Himpun	1 Dokumen	10.000.000	-
	PROGRAM PENYALURAN PERUSAHAAN	Kota PK	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi	100%	41.971.240.264	PROGRAM PENYALURAN PERUSAHAAN	Kota PK	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi	100%	41.971.240.264	-
10	Pengabdian Masyarakat	Kota PK	Jumlah masyarakat yang dilayani	144.000.000 jiwa	41.971.240.264	Pengabdian Masyarakat	Kota PK	Jumlah masyarakat yang dilayani	144.000.000 jiwa	41.971.240.264	-
20	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Strategi Daerah Pengabdian Masyarakat Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengabdian Masyarakat Kabupaten Kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	10.000.000	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Strategi Daerah Pengabdian Masyarakat Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengabdian Masyarakat Kabupaten Kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	10.000.000	-
30	Pengabdian Masyarakat dengan melibatkan Pemerintah, Persewaan, Usaha dan Perindustrian Daerah	Kota PK	Jumlah Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat dengan melibatkan Pemerintah, Persewaan, Usaha dan Perindustrian Daerah	1 Laporan	1.000.000.000	Pengabdian Masyarakat dengan melibatkan Pemerintah, Persewaan, Usaha dan Perindustrian Daerah	Kota PK	Jumlah Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat dengan melibatkan Pemerintah, Persewaan, Usaha dan Perindustrian Daerah	1 Laporan	1.000.000.000	-

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA POSTANAK											
No	Rancangan Awal RKPD					Realisasi Eksternal					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Peningkatan Sampah Dengan Melibatkan Persewaan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST/SPA Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Dikeloh, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	100.000.000.000	10.500.000.000	Peningkatan Sampah Dengan Melibatkan Persewaan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Kota PK	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Dikeloh, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	100.000.000.000	10.500.000.000	-
35	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Perumahan	Kota PK	Andah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Bersama Masyarakat	30 kelompok	170.426.300	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Perumahan	Kota PK	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Bersama Masyarakat	30 kelompok	170.426.300	-
36	Peningkatan Kualitas Kegiatan Pengelolaan Perumahan	Kota PK	Jumlah Dokumen Keaktifan Perumahan Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota yang Ditayangkan	1 Dokumen	1.000.000.000	Peningkatan Kualitas Kegiatan Pengelolaan Perumahan	Kota PK	Jumlah Dokumen Keaktifan Perumahan Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota yang Ditayangkan	1 Dokumen	1.000.000.000	-
37	Peningkatan peran dan program pengelolaan perumahan di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota	Kota PK	Andah Sama dan Program Kegiatan Perumahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 unit	6.562.338.396	Peningkatan peran dan program pengelolaan perumahan di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota	Kota PK	Jumlah Sama dan Program Kegiatan Perumahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 unit	6.562.338.396	-
Total						62.294.231.577				62.294.231.577	

2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan Perunjuk Teknik pelaksanaan Musrenbang serta dengan memperhatikan koridor tugas pokok dan fungsi SKPD serta dengan memperhatikan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan. DLH sendiri telah menetapkan aturan main untuk uraian-uraian program dan kegiatan dari masyarakat yang dapat diakomodir atau disetujui oleh OPD teknis DLH.

Tabel 4
Uraian Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Pontianak

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BELAKANG TAHUN	TARUHAN
1	2	3	4	5	6
1	Program pengalihan Perumahan				
1	Kegiatan Pengalihan Sampah				
1	Sulit Kegiatan Pengalihan Sampah dengan melibatkan Pemukiman, Perumahan, Ujung dan Perumahan Rantau	W. Kalimantan Hilir, 1000 Rumah RT 04 RW 24 Kota Pontianak	jumlah rumah yang berhasil dipindah-pindahkan Perumahan Ujung dan Perumahan Rantau (Rum)	1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		RT 04 RW 04 Kelurahan Manto Hill Pontianak Utara		2000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		R. April Kemp. Yasa Jalor I, Gg. Jorip I Dulu, Kemp. Arduwara Blok CDA, Gg. Bakari, Gg. Bayan Dulu, Blok Diantah		5000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		Kemp. Tumpang Laka, RT 07 RW 01 Kota Pontianak		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		Kemp. Vila Arduwara Blok I RT 01 RW 03 Kota Pontianak		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		RT 01 RW 01 Blok 1, Kota Pontianak		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		RT 01 RW 01 Blok 1, Kota Pontianak		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		Gg. Satria Jaya, RT 04 RW 01 Komplek Belian, Kota Pontianak		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		Gg. Jorip RW 04 Komplek Bahang, Kota Pontianak		5000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		Komplek Taha RW 01 Komplek Bahang, Kota Pontianak		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		RW 01 RT 01 Komplek Jati Ujung, Kota Pontianak		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		5 Belant 1 RW 01 Komplek Jati Ujung, Kota Pontianak		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		Gg. Bumi RT 04 RW 001, Blok Jati Ujung Pontianak Barat		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		Gg. Bumi 2 Dulu RT 00 RW 01, Blok Jati Ujung Pontianak Barat		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		Gg. Siantan 04, Perumahan Tunggul Rantau Belitana Liris		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		Gg. Bumi Jaya RT 00 RW 001, Perumahan Bumi, Komplek Bahang		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		Gg. Bumi RT 00 RW 001, Perumahan Liris, Perumahan Tunggul		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		R. Prof. M. Yamin Gg. Jati Belitana RT 00 RW 001, Perumahan Belitana, Kota Baru		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir
		Gg. Jati Jaya RT 00 RW 001, Perumahan Bumi, Komplek Bahang		1000	Pengalihan Rumah Keperumahan Kota Tjir

<p>006 Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melibatkan Persewaan, Pendidikan Ulang dan Pemeliharaan sampah</p>	<p>A. Swadaya RT 001 RW 01, Tambora Sampah, Pemukiman Timor</p>	<p>Jumlah sampah yang dikurangi dengan melibatkan Persewaan, Pendidikan Ulang dan Pemeliharaan sampah (Tim)</p>	<p>2 buah</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah Terpadu</p>
	<p>Jumlah RW 001, Sampah Jaya Liris, Pemukiman Bumi</p>		<p>2 buah</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah Terpadu</p>
	<p>TPSIR Binaan, Dapur Binaan, Pemukiman Timor, Kelurahan Dumak Welay, Pemukiman Kota</p>		<p>1 unit</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah Terpadu</p>
	<p>A. Pura Melayu RW 001, Binaan Tempat Pemukiman Utara</p>		<p>1 unit</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah Terpadu</p>
	<p>Gp. Gajahwadi I RT 001 RW 001, Binaan Melayu Dumak, Pemukiman Selatan</p>		<p>1 unit</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah Terpadu</p>
	<p>Kampung Sajar Nelayan 2 Jalan Prof. Dr. Heryadi RW 004, Sampah Jaya, Pemukiman Kota</p>		<p>2 buah</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah Terpadu</p>
	<p>Kampung Yaka RW 011, Sampah Sejahtera, Pemukiman Bumi</p>		<p>1 unit</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah Terpadu</p>
<p>007 Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melibatkan Persewaan, Pendidikan Ulang dan Pemeliharaan sampah</p>	<p>Gp. Bakhu RT 001 RW 001, Tembak, Kota Pemukiman</p>	<p>Jumlah sampah yang dikurangi dengan melibatkan Persewaan, Pendidikan Ulang dan Pemeliharaan sampah (Tim)</p>	<p>1 unit</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah</p>
	<p>A. Kertas RT 001 RW 001, Tembak, Kota Pemukiman</p>		<p>1 unit</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah</p>
	<p>Gp. Kembang RT 01 RW 011, Kota Pemukiman</p>		<p>1 unit</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah</p>
	<p>RW 04 Gunung Jaya Dalem, Kota Pemukiman</p>		<p>2 unit</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah</p>
	<p>Kel. Bina Melayu Gajah, Kota Pemukiman</p>		<p>2 unit</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah</p>
<p>008 Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melibatkan Persewaan, Pendidikan Ulang dan Pemeliharaan sampah</p>	<p>Jukung 1 RT 01 RW 001, Kampung Binaan, Binaan Pemukiman, Pemukiman Timor (Kampung) 18 x 12</p>	<p>Jumlah sampah yang dikurangi dengan melibatkan Persewaan, Pendidikan Ulang dan Pemeliharaan sampah (Tim)</p>	<p>1 unit</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah</p>
	<p>Jumlah sampah Koteka 2 Pemukiman Agung RW 001, Puri Timor, Pemukiman Bumi</p>		<p>1 unit</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah</p>
<p>009 Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melibatkan Persewaan, Pendidikan Ulang dan Pemeliharaan sampah</p>	<p>Jumlah sampah Koteka 2, Pemukiman Agung RW 001, Puri Timor, Pemukiman Bumi</p>	<p>Jumlah sampah yang dikurangi dengan melibatkan Persewaan, Pendidikan Ulang dan Pemeliharaan sampah (Tim)</p>	<p>1 unit</p>	<p>Pengaduan Tempat Sampah</p>

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak Tahun 2020 -2024 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 5
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024

ARAH KEBIJAKAN				
Tahun Pertama (2020)	Tahun Kedua (2021)	Tahun Ketiga (2022)	Tahun Keempat (2023)	Tahun Kelima (2024)
Tahap Konsolidasi	Tahap Percepatan	Tahap Pengembangan	Tahap Pemantapan	Tahap Penguatan
Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mewujudkan kota yang aman dan nyaman	Optimalisasi pengelolaan sumber daya kota secara cerdas serta percepatan pembangunan kawasan dan sektor strategis yang mendukung peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat	Melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah dan seluruh sektor secara seimbang sesuai karakteristik dan potensi masing – masing wilayah disertai dengan peningkatan aksesibilitas antar kawasan	Memperindah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan serta optimalisasi seluruh stakeholder untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ekonomi dan sosial budaya untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Perangka Daerah

Visi dan Misi Kota Pontianak Periode 2020 – 2024 adalah :

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”

Pontianak Kota Khatulistiwa

Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintas garis khatulistiwa.

Berwawasan Lingkungan

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal yang penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

Cerdas

Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif dan terintegrasi.

Bermartabat

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi yang telah dikemukakan di atas haruslah dirumuskan lebih lanjut dengan misi yang lebih terukur, objektif dan spesifik. Misi merupakan pernyataan yang memberikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh seluruh pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dengan adanya misi tersebut diharapkan memperkenalkan semua kontribusi yang harus dicapai oleh setiap aparat termasuk program dan hasil yang ingin dicapai.

Misi Kota Pontianak Periode 2020 – 2024 adalah :

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya,
- 2) Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif,
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas,
- 4) Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing,
- 5) Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah pada MISI KE-LIMA (5) yaitu mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota sesuai dengan Renstra DLH Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024.

Tabel 6
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan lahan (IKTL)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Target IKLH
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan dan Pengurangan Sampah
		Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan Kerjasama pengelolaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan
			Persentase pengisirsagaan lingkungan yang diterima Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti

STRATEGI

1. Meningkatkan pembangunan IPAL Komunal di Kawasan Permukiman
2. Menyediakan alat pemulihan air yang ditempatkan di badan parit sungai
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana dalam pemantauan kualitas air permukaan di badan sungai/parit
4. Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran terhadap perda pengelolaan air limbah
5. Melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. Melaksanakan program keanekaragaman hayati
7. Penegakan hukum lingkungan
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah dan operasional keberlisan
9. Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya
10. Mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah mengacu dari program yang telah ditetapkan yaitu tidak lepas dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah tercantum dalam RPMD Kota Pontianak, terdiri dari 1 (satu) program induk dan 9 (sembilan) program teknis. Program dan kegiatan ini dilaksanakan untuk kelancaran operasional perkantoran. Sedangkan untuk kegiatan terdapat 19 macam kegiatan dengan 63 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

- 7) Rencana Perumahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
- 8) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- 9) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 10) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 11) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

- 12) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

- 13) Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 14) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
 - 15) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - 16) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten Kota

8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - 17) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kota

9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 18) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - 19) Pengelolaan Sampah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Jumlah Program yang dicanangkan pada tahun anggaran 2023 adalah 10 Program sebagai berikut :

Belanja Kegiatan Urusan Sekretariat terdiri 1 program pemungjang yaitu :

1. Program Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp. 15.371.224.892 dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 buah kegiatan dan 30 Sub kegiatan.

Belanja Kegiatan Urusan Bidang Lingkungan Hidup terdiri 9 program pembangunan yaitu :

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 245.206.816 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 851.184.855 dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 buah kegiatan dan 8 Sub Kegiatan.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Sebesar Rp. 62.671.500 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Sebesar Rp. 132.837.000 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 buah kegiatan dan 4 sub kegiatan.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Sebesar Rp. 188.027.800 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 4 sub kegiatan.
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyaluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Sebesar Rp. 1.212.134.150 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Sebesar Rp. 222.529.800 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 1 sub kegiatan.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 38.123.500 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 2 sub kegiatan.
10. Program Pengelolaan Pertampakan Sebesar Rp. 42.971.240.264 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 7 sub kegiatan.

Tabel 7 Terlampir

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pontianak Tahun 2023 ini disusun dalam rumusan program dan kegiatan yang merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra DLH Tahun 2020-2024, identifikasi isu-isu penting bidang lingkungan hidup, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DLH Kota Pontianak, review atas rencana awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2023, hasil analisa kebutuhan instansi.

Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2023 masih difitikberatkan pada upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menurunkan beban pencemaran baik air maupun udara, peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah, pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah serta upaya pengurangan sampah sejak dari sumber sampah baik rumah tangga maupun usaha industri sesuai dengan Renstra, hasil Mustemberang. Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, DLH Kota Pontianak akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab DLH Kota Pontianak sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki.

Demikian gambaran singkat tentang pengjabaran Perubahan Rencana Kerja (RENUA) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 dengan berdasarkan asas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang akan datang.

Pontianak, Agustus 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pontianak

Ir.Sy.Usmulyono, MT
Pembina Tingkat I
Nip. 19671017 199703 1 002